

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Aminuddin Slamet, 1999, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung.
- Alimuddin, 2014, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bustami, et. al., 2020, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Deepublish, Yogyakarta.
- Djubaedah, Neng, 2010a, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Djubaedah, Neng, 2010b, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 1997, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Ja'far, H. A. Kumedi, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2020, *Status Anak Luar Nikah di Indonesia*, Gaung Persada, Tangerang Selatan
- L., Sudirman, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parapare Nusantara Press, Parapare.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Mathlub, Abdul Muhammad, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo.

- Milala, Ferniandi, 2015, *Kekuatan Pembuktian Hasil Tes DNA dalam Penetapan Asal Usul Seseorang*, Persada Media, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nurjamal, Ecep, 2020, *Praktik Beracara di Peradilan Agama*, Edu Publisher, Tasikmalaya.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta.
- Prananto, Gunawan, 2011, *Legalitas Hasil Tes DNA Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Dalam Perkara Perdata dan Pidana*, Citra Surya Bakti, Bandung.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familierecht)*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ramulyo, Muhammad Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saija, R. dan Iqbal Taufik, 2016, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Sarwat, Ahmad, 2017, *Seri Fiqih Kehidupan: Pernikahan*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriatna dan Fatma Amilia, 2008, *Fiqh Munakahat Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Teras, Yogyakarta.
- Wiludjeng, J. M. Henny, 2020, *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

Yunus, Ahyuni, 2020, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Humanities Genius, Makassar.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Deepublish, Yogyakarta.

Jurnal

Ardhian, Reza Fitra, *et. al.*, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Privat Law*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2015.

Asripa, *et. al.*, “Nikah Sirri dalam Perspektif Islam”, *Imtiyaz*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020.

Bahri, Syamsul, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 66, Agustus 2015.

Faizal, Liky, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2016.

Johansyah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)”, *Solusi*, Vol. 19, No. 2, Mei 202.

Lubis, Mohamad Rouilly Parsaulian, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis”, *Premise Law Journal*, No. 10, 2017.

Manurung, Agus dan Lusiana Sulastri, “Polemik Pencatatan Anak dari Nikah Siri”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021.

Maramis, Friska Marselina, “Hak Mewaris Anak di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4, Juni 2017.

Muamar, Afif, “Ketentuan Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional”, *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013.

Mubarok, Nafi’, “Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak”, *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016

Mustika, Dian, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam”, *Inovatif*, Vol. 4, No. 5, Juli 2011.

Rohmah, Siti, *et. al.*, “Kajian Konstitusionalisas Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Arena Hukum*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2019.

- S., Riyandi, "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", *Islam Futura*, Vol. 15, No. 1, Agustus 2015.
- Shamad, Muhammad Yunus, "Hukum Pernikahan dalam Islam", *Istiqra'*, Vol. 5, No. 1, September 2017.
- Simatupang, Bobby Daniel, "Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan)", *Lex Justitia*, Vol. 1, No. 1, Januari 2019.
- Sururie, Ramdani Wahyu, "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Al-Manahij*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017.
- Syakraeni, Andi, "Nikah dalam Perspektif Al Quran", *Jurnal Al Hikmah*, Vol. 19, No. 2, 2017.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah", *An-Nuha*, Vol. 5, No. 1, Juli 2018.
- Ulum, Muh. Bachrul, "Kedudukan Hasil Tes DNA dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Nikah", *Al-Manahij*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2009.
- Umar, Muhamad, "Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Mualaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi", *Literasiologi*, Vol. 5, No. 2, Januari-Juni 2021.
- Wibisana, Wahyu, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016.

Artikel

- Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif", *Pengadilan Agama Mojokerto*, 24 Maret 2020.
- Qohar, Adnan, "Isbat Poligam Antara Penyelundupan dan Terobosan Hukum", *Pengadilan Agama Nganjuk*, 11 Februari 2015.

Daftar Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

- Muis, Mirza, 2018, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Salsabila, Sabila, 2021, “Analisis Praktik Kawin Siri di Ddesa Tattangoh Kabupaten Pamekasan”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Widyaningsih, Rika Wahyu, 2015, “Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Iddah: Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Daftar Peraturan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Yk.